

LAPORAN

BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
TERHADAP PEMBAHASAN
RAPERDA KABUPATEN LAMONGAN
TENTANG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2010

DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD
TANGGAL 5 OKTOBER 2010



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

Jl. KH. Achmad Dahlan No. 1 Telp. (0322) 321321, 321729
LAMONGAN

LAPORAN

**BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
TERHADAP PEMBAHASAN
RAPERDA KABUPATEN LAMONGAN
TENTANG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2010**

**DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD
TANGGAL 5 OKTOBER 2010**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN**

**Jl. KH. Achmad Dahlan No. 1 Telp. (0322) 321321, 321729
LAMONGAN**

**LAPORAN
BADAN ANGGARAN
ATAS HASIL PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2010
TANGGAL 5 OKTOBER 2010**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yth. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Lamongan;
- Yth. Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Lamongan;
- Yth. Sdr. Anggota Muspida Kabupaten Lamongan;
- Yth. Sdr. Sekretaris Daerah, Para Asisten dan Sekretaris Dewan;
- Yth. Sdr. Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor dan Kepala Bagian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
- Yth. Sdr. Para Camat, Rekan-rekan wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Pada kesempatan yang baik ini marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan hidayahNya yang diberikan kepada kita sehingga hari ini kita bisa menghadiri rapat paripurna DPRD dalam rangka Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Perubahan

APBD Tahun Anggaran 2010 dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan.

Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Terlebih dahulu perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan Rapat, atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lamongan atas hasil pembahasan Raperda Kabupaten Lamongan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010.

Selain itu, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada yang terhormat Saudara Bupati Lamongan yang telah menyampaikan Nota Pengantar Keuangan atas Raperda Kabupaten Lamongan Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 pada rapat paripurna hari pertama dan Penyampaian Jawaban Bupati atas Pemandangan umum Fraksi-fraksi pada Rapat Paripurna hari ketiga, sehingga dapat memberikan gambaran dan memperjelas Badan Anggaran dalam menelaah, menanggapi, mencermati dan membahas Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010.

Disamping itu, tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada seluruh Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Lamongan serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang telah turut serta memberikan pemikiran berupa masukan, koreksi, saran dan harapan selama dalam pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 sehingga setelah ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD hari ini dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya perkenankanlah kami menyampaikan laporan Badan Anggaran dengan sistematika sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
- II. DASAR DAN PROSES PEMBAHASAN
- III. HASIL PEMBAHASAN
- IV. PENDAPAT BADAN ANGGARAN
- V. REKOMENDASI BADAN ANGGARAN
- VI. PENUTUP

II. DASAR DAN PROSES PEMBAHASAN

- a. Surat Bupati Lamongan tanggal 25 Agustus 2010 Nomor 903/447/413.115/2010 perihal Pengiriman Konsep Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010;
- b. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Lamongan tanggal 27 Agustus 2010 yang mengambil keputusan sebagai berikut :
 1. Hari Senin tanggal 6 September 2010, Rapat Paripurna Hari Pertama Penyampaian Pengantar Nota Keuangan Bupati Lamongan atas Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010;
 2. Hari Selasa dan Rabu tanggal 7 dan 8 September 2010
Rapat Fraksi-fraksi untuk mencermati, menelaah dan menganalisa atas Pengantar Nota Keuangan Bupati Lamongan;
 3. Hari Kamis tanggal 16 September 2010
Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas Pengantar Nota Keuangan Bupati Lamongan;
 4. Hari Selasa tanggal 21 September 2010
Penyampaian jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi;

2010 yang sekaligus merupakan forum validasi dalam rangka untuk menyusun Laporan Badan Anggaran;

10. Hari Selasa tanggal 5 Oktober 2010

Rapat Paripurna Hari Keempat dalam rangka Persetujuan Bersama atas Raperda Kabupaten Lamongan tentang Perubahan APBD APBD Tahun Anggaran 2010 sebagaimana yang kita laksanakan pada hari ini.

III. HASIL PEMBAHASAN

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Setelah Badan Anggaran bersama Tim Anggaran membahas Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 secara menyeluruh, baik sisi pendapatan maupun pada sisi belanja sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, maka hasilnya dapat kami sampaikan sebagai berikut :

A. PENDAPATAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2010,

Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar 881 milyar 981 juta 325 ribu 527 rupiah.

Sedangkan pendapatan dalam rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 ditargetkan menjadi sebesar 1 Trilyun 055 milyar 131 juta 143 ribu 607 rupiah yang berarti mengalami kenaikan sebesar 173 milyar 149 juta 818 ribu 080 rupiah atau naik sebesar 19,63%.

Kenaikan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 99 milyar 543 juta 466 ribu 057 rupiah, Dana Perimbangan sebesar 746 milyar 454 juta 158 ribu 300 rupiah, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar 209 milyar 133 juta 519 ribu 250 rupiah.

Pada Sisi Pendapatan Daerah dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 setelah dilakukan pembahasan menjadi sebesar 1 Trilyun 056 milyar 135 juta 066 ribu 107 rupiah, sehingga mengalami kenaikan sebesar 174 milyar 153 juta 740 ribu 580 rupiah.

B. BELANJA DAERAH

Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2010, dianggarkan sebesar 942 milyar 039 juta 572 ribu 020 rupiah, sedangkan dalam rancangan perubahan menjadi sebesar 1 triliun 122 milyar 109 juta 282 ribu 204 rupiah 51 sen sehingga mengalami kenaikan sebesar 180 milyar 069 juta 710 ribu 184 rupiah 51 sen atau naik sebesar 19,11 %.

Perubahan tersebut dialokasikan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar 822 milyar 191 juta 729 ribu 682 rupiah 51 sen dan Belanja Langsung sebesar 299 milyar 917 juta 552 ribu 522 rupiah.

Pada sisi Belanja Daerah dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 setelah dilakukan pembahasan menjadi sebesar 1 triliun 123 milyar 113 juta 204 ribu 704 rupiah 51 sen dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar 822 milyar 694 juta 462 ribu 182 rupiah 51 sen dan Belanja Langsung sebesar 300 milyar 418 juta 742 ribu 522 rupiah.

C. SURPLUS / DEFISIT

Berdasarkan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tersebut diatas, maka terjadi defisit anggaran sebesar 66 milyar 978 juta 138 ribu 597 rupiah 51 sen.

Sedangkan setelah pembahasan terjadi defisit yang besarnya sama dengan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010.

D. PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah terdiri dari dua komponen yaitu Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Untuk penerimaan pembiayaan setelah dilakukan pembahasan, besarnya sama dengan rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 yaitu sebesar 92 milyar 757 juta 221 ribu 797 rupiah 51 sen.

Hal yang sama juga terjadi pada pengeluaran pembiayaan. setelah dilakukan pembahasan, besarnya sama dengan rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 yaitu sebesar 25 milyar 779 juta 083 ribu 200 rupiah.

Sedangkan untuk pembiayaan Netto setelah dilakukan pembahasan sebesar 66 milyar 978 juta 138 ribu 597 rupiah 51 sen.

Dengan demikian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) menjadi NOL sebagaimana yang telah ditentukan dalam Permendagri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

IV. PENDAPAT BADAN ANGGARAN

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran dengan Tim Anggaran atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010, maka Badan Anggaran berpendapat sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah dialokasikan menjadi sebesar 1 triliyun 056 milyar 135 juta 066 ribu 107 rupiah, sehingga mengalami kenaikan sebesar 174 milyar 153 juta 740 ribu 580 rupiah.
2. Belanja Daerah dialokasikan menjadi sebesar 1 triliyun 123 milyar 113 juta 204 ribu 704 rupiah 51 sen, sehingga

mengalami kenaikan sebesar 181 milyar 073 juta 632 ribu 684 rupiah 51 sen.

3. Dari Tingkat Pendapatan dan Belanja Daerah yang ada pada Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 terjadi Defisit sebesar 66 milyar 978 juta 138 ribu 597 rupiah 51 sen.
4. Pembiayaan Daerah menjadi sebesar 66 milyar 978 juta 138 ribu 597 rupiah 51 sen yang berarti naik sebesar 6 milyar 917 juta 010 ribu 197 rupiah 51 sen.
5. Terhadap Raperda Kabupaten Lamongan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 telah mengalami penambahan, pengurangan dan pergeseran Anggaran. Disamping itu dalam penyusunannya telah mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalam pengelolaan anggaran serta penggunaannya sudah sesuai dengan kebutuhan riil yang dapat dipertanggungjawabkan.

V. REKOMENDASI BADAN ANGGARAN

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Dari hasil kajian dan evaluasi Badan Anggaran, maka pada kesempatan yang baik ini dapat disampaikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan, bahwa kondisi saat ini telah terjadi peningkatan beberapa obyek pajak dan retribusi yang dapat berakibat pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah sehingga perlu ada penambahan besaran pendapatan dari target yang semula direncanakan pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010. Oleh karena itu, Badan Anggaran meminta agar Saudara Bupati memerintahkan Kepala SKPD terkait untuk melakukan peningkatan kinerja supaya pendapatan yang direncanakan dapat tercapai sesuai target;
2. Badan Anggaran minta besaran kenaikan pendapatan yang disampaikan dalam pembahasan antara Badan Anggaran dengan Tim Anggaran direalisasikan sesuai hasil kesepakatan yang ada. Untuk itu, guna mengetahui kondisi riil potensi obyek pajak dan retribusi yang ada, maka kedepan Badan Anggaran meminta agar pemerintah daerah melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap potensi obyek pajak dan retribusi serta hasilnya disampaikan kepada DPRD sebagai bahan kajian lebih lanjut;
3. Ditengah keterbatasan kondisi fiskal pemerintah daerah saat ini yang secara umum mengakibatkan terjadinya

penurunan dan pergeseran anggaran belanja, maka Badan Anggaran meminta agar seluruh SKPD melakukan efisiensi anggaran serta melaksanakan program dan kegiatan secara tepat;

4. Dalam rangka untuk menopang kemampuan anggaran pemerintahan daerah, Badan Anggaran meminta agar Bupati dan SKPD proaktif melakukan komunikasi dan koordinasi ke pemerintah pusat dan pemerintah propinsi Jawa Timur guna mendapatkan bantuan anggaran dan proyek pembangunan di Kabupaten Lamongan. Untuk itu, pemerintah daerah diminta menyiapkan dana pendamping bantuan dari pemerintah pusat atau provinsi (*cost sharing*)
5. Agar Pasar Agrobis Babat dapat segera beroperasi sesuai fungsinya dengan baik, maka Badan Anggaran meminta agar pemerintah daerah secepatnya menuntaskan pembebasan tanah guna mendukung rencana pembangunan *Ring Road Babat* dan memanfaatkan keberadaan terminal MPU Babat secara optimal. Selain itu perlunya tindakan nyata mengenai relokasi pedagang dari pasar lama ke Pasar Agrobis Babat;

6. Keberadaan RSUD Dr. Soegiri Lamongan sebagai satu-satunya rumah sakit pemerintah daerah hendaknya dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara baik, ramah dengan biaya yang murah. Harapan tersebut tentu tidak berlebihan karena anggaran RSUD Dr. Soegiri Lamongan berasal dari APBD. Oleh karena itu, Badan Anggaran meminta kepada Saudara Bupati agar melakukan penataan manajemen dan perbaikan pelayanan agar harapan seluruh masyarakat untuk dapat menikmati pelayanan kesehatan secara baik dapat terwujud;
7. Mengamati maraknya pendirian tempat karaoke di Lamongan saat ini, maka Badan Anggaran meminta pemerintah daerah bertindak tegas dan melakukan tindakan seperlunya sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pengaturan Usaha Rumah Makan dan Jasa Boga Di Kabupaten Lamongan sehingga tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan mengakibatkan degradasi moral masyarakat terutama generasi muda. Sehubungan dengan banyaknya aspirasi masyarakat yang keberatan atas berdirinya tempat karaoke, maka Badan Anggaran meminta agar pemerintah daerah tidak

menerbitkan ijin terlebih dahulu sebelum ada revisi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2005;

8. Dalam rangka menghadapi musim penghujan, maka pemerintah daerah harus mengambil langkah-langkah preventif diantaranya melakukan pengecekan terhadap kondisi saluran patus dan saluran irigasi lainnya. Selain itu, keberadaan ENCENG GONDOK sebagai salah satu penyebab terhambatnya arus air yang dapat mengakibatkan banjir harus segera diatasi dan dicarikan solusi yang tepat. Sebagai upaya sementara mengatasi permasalahan tersebut, maka Badan Anggaran sangat mendukung langkah pemerintah daerah dalam melakukan pembersihan ENCENG GONDOK dan meminta program tersebut dilakukan secara rutin dengan melibatkan SKPD terkait dan masyarakat sekitar;
9. Dalam rangka mendukung kelancaran roda kegiatan ekonomi masyarakat di pedesaan maka perlu didukung adanya penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan yang baik dan berkualitas. Badan Anggaran menilai saat ini masih banyak kondisi jalan yang sudah rusak dan harus dilakukan perbaikan.

Mengingat keterbatasan kondisi fiskal saat ini, maka Badan Anggaran meminta pemerintah daerah membuat skala prioritas penanganan jalan dan jembatan yang harus segera memperoleh perawatan/pemeliharaan;

10. Perkembangan investasi di kecamatan Brondong dan Paciran yang ditandai berdirinya beberapa perusahaan besar mengakibatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar semakin meningkat. Selain itu, keberadaan Pasar Agrobis Babat dan rencana pembangunan Pasar Modern Babat sebagai pusat perbelanjaan lintas daerah juga perlu ditunjang fasilitas pendukung dengan baik.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Badan Anggaran meminta pemerintah daerah menyediakan fasilitas Mobil Pemadam Kebakaran dan Truk Pengangkut Sampah di Kecamatan Brondong, Paciran dan Babat;

11. Terkait pendataan tenaga honorer yang bekerja dilingkungan pemerintah daerah, Badan Anggaran minta agar pelaksanaan pendataan dan verifikasi tenaga honorer dilakukan sesuai ketentuan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 5 Tahun 2010 serta hasilnya harus diumumkan kepada publik secara transparan;

Selain itu, dalam rangka regenerasi pejabat struktural, maka perpanjangan batas usia pensiun pejabat harus betul-betul dianalisis oleh pejabat pembina kepegawaian serta memperhatikan asas kepatutan dan kepantasan;

12. Dalam rangka memberikan keselamatan bagi para pengguna jalan dan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, maka pemerintah daerah diharapkan memasang *warning light* pada beberapa lokasi tertentu yang rawan kecelakaan.

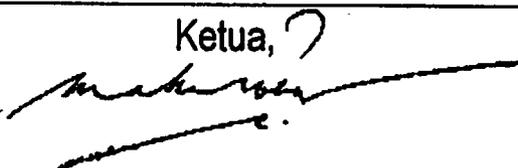
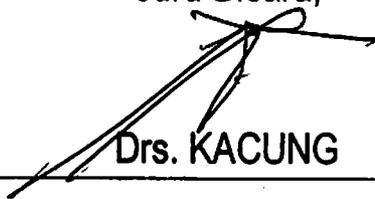
Selain itu, guna memberikan kenyamanan berkendara, maka Badan Anggaran juga berharap di beberapa perbatasan diantaranya Lamongan-Jombang di pasang Lampu Penerangan Jalan Umum;

13. Agar keberadaan Waduk Gondang sebagai salah satu obyek wisata milik pemerintah daerah dapat berkembang dengan baik dan produktif untuk menopang Pendapatan Asli Daerah, maka Badan Anggaran meminta agar pemerintah daerah melakukan perbaikan manajemen pengelolaan dan perbaikan wahana rekreasi;

VI. PENUTUP

Demikian Laporan Badan Anggaran yang dapat kami disampaikan dalam forum rapat paripurna DPRD hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan bersama ini selalu mendapatkan ridho dari Allah SWT.

Sekian terima kasih atas perhatiannya Wabillahi taufiq walhidayah Ws. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN BADAN ANGGARAN	
Ketua,  H. MAKIN ABBAS, Lc, MA	Juru Bicara,  Drs. KACUNG